

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023**

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



Jalan Merdeka 147 Bogor

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

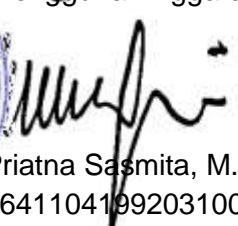
Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Bogor , 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran ,


Dr. Ir. Priatna Sasmita, M.Si
NIP. 196411041992031001

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	21
B.2. Belanja	22
B.3. Belanja Pegawai	24
B.4. Belanja Barang	24
B.5. Belanja Modal	25
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	27
C.1.1. Persediaan	27
C.2. Aset Tetap	28
C.2.1. Tanah	28
C.2.2. Peralatan dan Mesin	28
C.2.3. Gedung dan Bangunan	29
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	30
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	30
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
C.3. Aset Lainnya	32
C.3.1. Dana yang dibatasi penggunaannya	32
C.3.2. Aset Lain-lain	32
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	33
D.2. Beban Pegawai	33
D.3. Beban Persediaan	34
D.4. Beban Barang dan Jasa	35
D.5. Beban Pemeliharaan	36
D.6. Beban Perjalanan Dinas	37
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	38

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1. Ekuitas Awal	40
E.2. Surplus/Defisit-LO	40
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar ..	40
E.4. Transaksi Antar Entitas	40
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	41
E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	41
E.5. Ekuitas Akhir	41
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	42
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	42
F.2. Pengungkapan Lain-lain	42

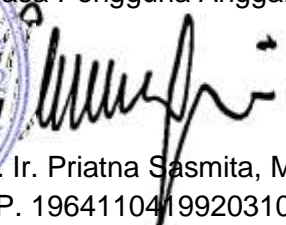
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bogor , 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran ,


Dr. Ir. Priatna Sasmita, M.Si
NIP. 196411041992031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.974.805,00 atau mencapai 245% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.660.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp10.579.975,146,00 atau mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.024.969.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp589.150.660.748,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.544.300,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp588.939.687.319,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp209.744.129,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp589.150.660.748,00 dan Rp589.150.660.748,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.322.005,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.375.085.357,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai -Rp11.372.763.352,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp6.652.800,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp11.549.337.552,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp590.074.258.809,00 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp11.549.337.552,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.625.739.491,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp589.150.660.748,00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023			31 DESEMBER 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	3.660.000,00	8.974.805,00	245	12.055.424,00
Jumlah Pendapatan		3.660.000,00	8.974.805,00	245	12.055.424,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.390.061.000,00	3.339.665.959,00	99	4.570.687.540,00
Belanja Barang	B.4.	6.102.488.000,00	5.709.788.389,00	94	6.416.806.505,00
Belanja Modal	B.5.	1.532.420.000,00	1.530.520.798,00	100	149.850.000,00
Jumlah Belanja		11.024.969.000,00	10.579.975.146,00	96	11.137.344.045,00

II. NERACA

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	1.544.300,00	1.227.700,00
Jumlah Aset Lancar		1.544.300,00	1.227.700,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	573.513.692.150,00	573.458.953.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	9.531.452.312,00	9.281.915.082,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	25.827.872.281,00	25.827.872.281,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.289.599.000,00	1.289.599.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	376.894.669,00	183.227.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(21.599.823.093)	(19.968.535.254,00)
Jumlah Aset Tetap		588.939.687.319,00	590.073.031.109,00
Aset Lainnya			
Dana yang dibatasi Penggunaannya	C.3.1	209.114.129,00	0,00
Aset Lain-lain	C.3.2	694.974.770,00	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.3	(694.344.770,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		209.744.129,00	0,00
Jumlah Aset		589.150.660.748,00	590.074.258.809,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.4.1	589.150.660.748,00	590.074.258.809,00
Jumlah Ekuitas	C.4.2	589.150.660.748,00	590.074.258.809,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		589.150.660.748,00	590.074.258.809,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	2.322.005,00	2.421.724,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.322.005,00	2.421.724,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.339.665.959,00	4.570.687.540,00
Beban Persediaan	D.3.	578.666.502,00	728.327.243,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.790.297.315,00	3.549.289.333,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	715.638.496,00	673.021.089,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.624.869.496,00	1.468.510.340,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.325.947.609,00	5.424.628.762,00
JUMLAH BEBAN		11.375.085.357,00	16.414.464.307,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.372.763.352,00)	(16.412.042.583,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	183.227.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	6.652.800,00	10.803.700,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(176.574.200,00)	10.803.700,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		(11.549.337.552,00)	(16.401.238.883,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	590.074.258.809,00	595.350.209.071,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(11.549.337.552,00)	(16.401.238.883,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	10.625.739.491,00	11.125.288.621,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(923.598.061,00)	(5.275.950.262,00)
EKUITAS AKHIR	E.6.	589.150.660.748,00	590.074.258.809,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September tentang Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dibentuk sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya BSIP mengkoordinasikan beberapa Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis. Unit Kerja BSIP terdiri dari 5 (lima) lembaga setingkat eselon II a, yaitu (1) Sekretariat Badan; (2) Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan; (3) Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Perkebunan; (4) Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Hortikultura; dan (5) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Permentan Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Salah satu unit Eselon II di bawah BSIP adalah Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan. Dengan adanya Permentan ini maka Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tidak berlaku lagi. Dalam Permentan Nomor 19 tahun 2022 dimaksud disebutkan bahwa Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi

Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan
- Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Tugas dan Fungsi Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Berdasarkan Permentan Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
- c. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang tanaman pangan;
- d. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang tanaman pangan;
- e. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

Struktur Organisasi

Struktur organisasi saat ini. Kepala Pusat dibantu oleh (1) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Kepmentan Nomor 278 Tahun 2023 terdapat kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi Standar Instrumen Tanaman Pangan
 - 1) Tim Kerja Program Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
 - 2) Tim Kerja Evaluasi Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
- b. Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
 - 1) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
 - 2) Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
- c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas, dan fungsinya, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan didukung sejumlah tenaga fungsional dan administrasi guna melaksanakan Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan. Berbagai upaya pembinaan telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM, baik melalui pelatihan jangka pendek, jangka panjang, yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan maupun diselenggarakan secara inhouse.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.660.000	3.660.000
Jumlah Pendapatan	3.660.000	3.660.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.468.741.000	3.390.061.000
Belanja Lembur	0,00	0,00
Belanja Barang Operasional	1.824.555.000	1.819.687.000
Belanja Barang Non Operasional	6.040.450.000	455.095.000
Belanja Barang Persediaan	3.179.780.000	543.042.000
Belanja Jasa	982,7000,000	656.726.000
Belanja Pemeliharaan	717.515.000	770.947.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.650.000.000	1.857.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	944.512.0000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	586.008.798
Jumlah Belanja	17.863.741.000	11.024.969.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.974.805,00 atau mencapai 245% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.660.000,00. Yang Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.660.000,00	2.322.005,00	63,44
Pendapatan Lain-Lain	0	6.652.800,00	100
Jumlah	3.660.000,00	8.974.805,00	245

Penurunan realisasi pendapatan sebesar -34,33% dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2023 hanya terdapat pendapatan dari sewa rumah dinas. Selain itu Pendapatan dari penerimaan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu juga lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.322.005,00	2.421.724,00	(4,29)
Pendapatan Lain-Lain	6.652.800,00	9.633.700,00	(44,81)
Jumlah	8.974.805,00	11.927.924,00	(34,33)

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp10.579.975.146,00 atau 96% dari anggaran belanja sebesar Rp11.024.969.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.390.061.000,00	3.339.665.959,00	99
Belanja Barang	6.102.488.000,00	5.709.788.389,00	94
Belanja Modal	1.532.420.000,00	1.530.520.798,00	100
Total Belanja Kotor	11.024.969.000,00	10.579.975.146,00	96
Pengembalian Belanja	0,00	14.063.448,00	0
Total Belanja	11.024.969.000,00	10.579.975.146,00	96

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -5,27% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Belanja Pegawai senilai - Rp1.230.091.144,00 atau -36,86% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan anggaran mengalami penurunan, pegawai pindah ke BRIN sebanyak 10 orang serta pegawai purna tugas.
2. Penurunan Belanja Barang senilai -Rp707.018.116,00 atau -12,38% dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan TA. 2023 kegiatan penelitian dan pengembangan sudah tidak ada, dan beberapa kegiatan dari standardisasi masih dalam proses pembentukan awal sehingga pendanaannya terbatas.
3. Kenaikan Belanja Modal senilai Rp1.380.670.798,00 atau 90,21 % dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan pada tahun anggaran 2023 terdapat alokasi belanja modal Peralatan dan Mesin berupa 1 paket videotron senilai Rp.944.512.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Renovasi Pagar dan Gapura senilai Rp.586.008.798,00.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	3.339.665.959,00	4.570.687.540,00	(36,86)
Belanja Barang	5.709.788.389,00	6.416.806.505,00	(12,38)
Belanja Modal	1.530.520.798,00	149.850.000,00	90,21
Total Belanja	10.579.975,146,00	11.137.344.045,00	(5,27)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.339.665.959,00 dan Rp4.570.687.540,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -36,86% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat Pegawai yang pindah ke BRIN sebanyak 10 orang
2. Adanya beberapa pegawai yang mengalami masa purna tugas
3. Pengembalian belanja pegawai yaitu sebesar Rp248,00 pembulatan gaji pegawai dan Rp.370.000,00 belanja tunjangan umum.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.340.036.207,00	4.570.687.540,00	(36,84)
Jumlah Belanja Kotor	3.340.036.207,00	4.570.687.540,00	(36,84)
Pengembalian Belanja Pegawai	370.248,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.339.665.959,00	4.570.687.540,00	(36,86)

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.709.788.389,00 dan Rp6.416.806.505,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar -12,38% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kegiatan penelitian dan pengembangan sudah tidak ada, dan beberapa kegiatan dari standardisasi masih dalam proses pembentukan awal sehingga pendanaannya terbatas serta BSIP baru saja disahkan menyebabkan ada beberapa kegiatan yang memang belum di laksanakan di tahun awal.
2. Anggaran kegiatan Standardisasi baru dibuka blokirnya pada bulan April 2023 dan pada bulan November 2023 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp300.000.000,00.
3. Terdapat pengembalian belanja hasil dari audit Kinerja Itjen yaitu pengembalian belanja Jasa Profesi sebesar Rp7.900.000,00, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp4.748.200,00 dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.045.000,00.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.764.485.662,00	1.717.011.163,00	(2,69)
Belanja Barang Non Operasional	417.441.285,00	1.159.255.450,00	(177,71)
Belanja Barang Persediaan	532.952.406,00	770.875.347,00	(44,64)
Belanja Jasa	616.270.368,00	671.852.720,00	(9,02)
Belanja Pemeliharaan	767.462.372,00	629.301.485,00	18,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.624.869.496,00	1.468.510.340,00	9,62
Jumlah Belanja Kotor	5.723.481.589,00	6.416.806.505,00	(12,11)
Pengembalian Belanja Barang	13.693.200,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.709.788.389,00	6.416.806.505,00	(12,38)

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.530.520.798,00 dan Rp149.850.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 921,37% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Belanja Modal senilai Rp1.380.670.798,00 atau 921,37 % dari periode 31 Desember 2022 dikarenakan pada tahun anggaran 2023 terdapat alokasi belanja modal Peralatan dan Mesin berupa 1 paket videotron senilai Rp944.512.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Renovasi Pagar dan Gapura senilai Rp586.008.798,00.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	944.512.000,00	149.850.000,00	530,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	586.008.798,00	0,00	100
Jumlah Belanja Kotor	1.530.520.798,00	149.850.000,00	921,37
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.530.520.798,00	149.850.000,00	921,37

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp944.512.000,00 dan Rp149.850.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 530,30% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan terdapat pengadaan peralatan dan mesin berupa 1 paket videotron sebesar Rp944.512.000,00.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	944.512.000,00	149.850.000,00	530,30
Jumlah Belanja Kotor	944.512.000,00	149.850.000,00	530,30
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	944.512.000,00	149.850.000,00	530,30

B.5.1. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp586.008.798,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan terdapat Renovasi gedung dan Bangunan berupa Pagar dan Gapura sebesar Rp586.008.798,00.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	586.008.798,00	0,00	100
Jumlah Belanja Kotor	586.008.798,00	0,00	100
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	586.008.798,00	0,00	100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.544.300,00 dan Rp1.227.700,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	1.544.300,00	1.227.700,00
Jumlah	1.544.300,00	1.227.700,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp573.513.692.150,00 dan Rp573.458.953.000,00. Pada tahun 2023 Terdapat penambahan nilai aset tanah dari transfer masuk tanah dan bangunan berupa papan nama BSIP sebesar Rp.54.739.150,00 dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan BAST Nomor B-1100/PL.130/H.1/05/2023.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.531.452.312,00 dan Rp9.281.915.082,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	9.281.915.082,00
Mutasi Tambah	
- Pengadaan Videotron	944.512.000,00
Mutasi Kurang	
- Penghapusan	694.974.770,00

Saldo per 31 Desember 2023	9.531.452.312,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(8.224.917.228,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.306.535.084,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

- Terdapat mutasi penambahan peralatan dan mesin berupa 1 paket videotron senilai Rp.944.512.000,00

Mutasi transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Terdapat penghapusan peralatan dan Mesin sebanyak 97 Unit senilai Rp694.974.770,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.827.872.281,00 dan Rp25.827.872.281,00.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	25.827.872.281,00
Mutasi Tambah	
-	0,00
Mutasi Kurang	
-	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	25.827.872.281,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	(12.480.851.119,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	13.347.021.162,00

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

- Tidak ada mutasi penambahan Gedung dan Bangunan selama periode 31 Desember 2023

Mutasi transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Tidak ada mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan selama periode 31 Desember 2023.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pusat Standardisasi Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.289.599.000,00 dan Rp1.289.599.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	1.289.599.000,00
Mutasi Tambah	
-	0,00
Mutasi Kurang	
-	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.289.599.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(894.051.746,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	395.544.254,00

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

- Tidak ada mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode 31 Desember 2023

Mutasi transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa :

- Tidak ada mutasi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode 31 Desember 2023.

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp376.894.669,00 dan Rp183.227.000,00. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	0,00
Mutasi Tambah	
-	376.894.000,00
Mutasi Kurang	
-	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	376.894.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	376.894.000,00

Terdapat penambahan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp376.894.000,00 berasal dari pengawasan sebesar Rp.73.363.000 dan Rp.303.531.669 pekerjaan fisik pagar dan gapura disebabkan dari Pekerjaan Fisik renovasi gedung dan bangunan berupa pagar dan gapura belum selesai pengerjaannya sampai akhir tahun sehingga dilakukan perpanjangan waktu selama 45 hari.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar -Rp21.599.823.093,00 dan -Rp19.968.535.254,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9.531.452.312,00	(8.224.912.228,00)	1.306.535.084,00
2.	Gedung dan Bangunan	25.827.872.281,00	(12.480.851.119,00)	13.347.021.162,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.289.599.000,00	(894.051.746,00)	395.544.254,00
Akumulasi Penyusutan		35.704.411.593,00	(21.599.823.093,00)	15.049.100.500,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Dana yang dibatasi Penggunaannya

Aset lainnya yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.209.114.129,0 dan Rp.0,00. Aset lainnya merupakan dana yang dibatasi penggunaannya karena pekerjaan fisik renovasi gedung dan bangunan berupa pagar dan gapura belum selesai pengerjaannya sampai akhir tahun sehingga dilakukan perpanjangan waktunya selama 45 hari. Oleh karena itu sisa anggaran dimasukkan ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) di neraca menjadi aset lainnya berupa dana yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	0,00
Mutasi Tambah	
Dana yang dibatasi penggunaannya	209.114.129,00
Mutasi Kurang	
-	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	209.114.129,00

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp694.974.770,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara

(BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	0,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	694.974.770,00
Saldo per 31 Desember 2023	694.974.770,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(694.344.770,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	630.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Tidak ada mutasi penambahan Aset Lain-lain selama periode 31 Desember 2023

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa :

Usul Penghapusan peralatan dan mesin sebanyak 97 Unit senilai Rp.694.974.770,00 ke eselon I dengan nomor surat B-581/PL.310/H.2/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 serta surat dari Eselon I ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-447/PL.110/H/06/2023 tanggal 26 Juni 2023. Surat persetujuan telah terbit dengan nomor B-4417/PL.110/A/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 progress saat ini akan mengusulkan penghapusan peralatan dan mesin ke KPKNL.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desemberr 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-694.344.7700,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	694.974.770,00	(694.344.770,00)	630.000,00
Akumulasi Penyusutan		694.974.770,00	(694.344.770,00)	630.000,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.658.575,00 dan Rp2.336.724,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.322.005,00	2.421.724,00	(4,29)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.322.005,00	2.421.724,00	(4,29)

Terdapat pendapatan dari sewa gedung dan bangunan selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.322.005,00 pendapatan ini terdapat selisih dibanding tahun 2022 sebesar Rp.99.719,00, selisih ini terdiri dari :

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang lalu sebesar Rp.99.719,00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.771.892.370,00 dan Rp4.013.661.522,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.300.254.260,00	2.951.983.460,00	(28,33)
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.348,00	37.020,00	(18,09)
Beban Tunj. Anak PNS	48.631.268,00	60.537.108,00	(24,48)
Beban Tunj. Beras PNS	130.718.100,00	160.627.560,00	(22,88)
Beban Tunj. Fungsional PNS	170.454.000,00	578.960.000,00	(239,66)
Beban Tunj. PPh PNS	12.619.027,00	54.869.572,00	(334,82)
Beban Tunj. Struktural PNS	63.140.000,00	63.140.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	178.122.780,00	226.006.820,00	(26,88)
Beban Tunjangan Umum PNS	77.735.000,00	82.765.000,00	(6,47)
Beban Uang Makan PNS	312.177.000,00	391.761.000,00	(25,49)
Beban Gaji Pokok PPPK	33.043.600,00	0,00	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	520,00	0,00	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.058.880,00	0,00	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	211.776,00	0,00	100
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3.240.000,00	0,00	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.448.400,00	0,00	100
Beban Uang Makan PPPK	6.780.000,00	0,00	100
Jumlah	3.339.665.959,00	4.570.687.540,00	(36,86)

Jumlah beban pegawai jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.339.665.959,00 tidak terdapat selisih.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp578.666.502,00 dan Rp728.327.243,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan konsumsi	577.216.502,00	761.569.747,00	(31,94)
Beban persediaan lainnya	1.450.000,00	10.477.100,00	(622,56)
Jumlah	578.666.502,00	728.327.243,00	(25,86)

Jumlah realisasi belanja barang persediaan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.578.666.502,00. Nilai beban persediaan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp45.714.096,00. Selisih ini adalah belanja barang persediaan yang belanjanya menggunakan akun belanja barang persediaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.790.297.315,00 dan Rp3.549.289.333,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	379.741.285,00	312.705.450,00	17,65
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	109.500.000,00	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	28.625.000,00	42.400.000,00	(48,12)
Beban Barang Operasional Lainnya	74.760.000,00	49.970.000,00	33,16
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	165.597.000,00	138.840.000,00	16,16
Beban Honor Output Kegiatan	37.700.000,00	63.940.000,00	(69,60)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	1.228.000,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	93.200.000,00	70.200.000,00	24,68
Beban Jasa Profesi	71.000.000,00	93.900.000,00	(32,25)
Beban Keperluan Perkantoran	1.495.503.662,00	1.485.801.163,00	0,65

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Langganan Air	132.350.900,00	196.643.150,00	(48,58)
Beban Langganan Listrik	297.364.699,00	294.646.787,00	0,91
Beban Langganan Telepon	14.454.769,00	15.234.783,00	(5,40)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.790.297.315,00	3.549.289.333,00	(27,20)

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.790.297.315,00. Beban belanja barang dan jasa per 31 September 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp715.638.476,00 dan Rp673.021.089,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	48.650.400,00	43.719.604,00	10,14
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	217.318.051,00	228.540.809,00	(5,16)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	449.670.025,00	400.760.676,00	10,88
Jumlah	715.638.476,00	673.021.089,00	6,00

Jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp91.744.792,00. Selisih ini merupakan beban persediaan untuk pemeliharaan dan suku cadang yang belanjanya menggunakan akun persediaan dan pada Laporan Operasional membentuk akun beban persediaan untuk bahan pemeliharaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.624.869.496,00 dan Rp1.468.510.340,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.456.649.646,00	1.448.830.340,00	0,54
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	19.680.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	168.219.850,00	0,00	100
Jumlah	1.624.869.496,00	1.468.510.340,00	9,62

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.196.254.310,00 dan Rp5.424.628.762,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.606.591.466,00	4.107.491.355,00	(155,66)
Beban Penyusutan Irigasi	3.041.584,00	77.536.886,00	(2449,22)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	106.213.400,00	106.213.400,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	9.329.350,00	9.329.350,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.304.250,00	0,00	100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	596.467.559,00	1.124.057.771,00	(88,45)
Jumlah	2.325.947.609,00	5.424.628.762,00	(133,22)

Penurunan beban penyusutan dan amortisasi karena pada tahun ini terdapat penghapusan peralatan dan mesin sebanyak 97 Unit.

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(183.227.000,00)	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	183.227.000,00	0,00	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6.652.800,00	10.803.700,00	(62,39)
Jumlah	6.652.800,00	10.803.700,00	(62,39)

Surplus / defisit dari kegiatan non operasional terdiri atas :

- Penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp183.227.000,00 telah terbit Surat Keputusan dengan Nomor 09/Kpts/PL.310/A/01/2023
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp6.652.800,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp590.074.258.809,00 dan Rp595.350.209.071,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar – Rp11.549.337.552,00 dan – Rp16.401.238.883,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.625.739.491,00 dan Rp11.125.288.621,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.579.975.146,00
Transfer Masuk	54.739.150,00
Diterima dari Entitas Lain	(8.974.805,00)
Jumlah	10.625.739.491,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp8.974.805,00 sedangkan DKEL sebesar Rp10.579.975.146,00

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat transfer masuk berupa gedung dan bangunan dalam renovasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp54.739.150,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp589.150.660.748,00 dan Rp590.074.258.809,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lain-lain

1. Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp28.625.000,00 yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Layanan Perkantoran Penanganan Covid-19. Belanja penanganan pandemi Covid-19 ini telah dibelanjakan pada bulan Maret 2023 sebelum surat penggunaan akun covid-19 berakhir pada bulan Agustus 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp28.625.000,00 atau mencapai 100% dengan rincian :

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/ Subkomp/detil	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu
521131	Belanja Barang Operasional_Penanganan Pandemi Covid-19				
	- Multivitamin	11.250.000	11.250.000	100	-
	- Masker	7.500.000	7.500.000	100	-
	- Paket Eucalyptus	8.475.000	8.475.000	100	-
	- Disinfectant	1.400.000	1.400.000	100	-

2. Terdapat usul Penghapusan peralatan dan mesin sebanyak 97 Unit ke eselon I dengan nomor surat B-581/PL.310/H.2/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 serta surat dari Eselon I ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-447/PL.110/H/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 dan Surat persetujuan telah terbit dengan nomor B-4417/PL.110/A/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 progress saat ini akan mengusulkan penghapusan peralatan dan mesin ke KPKNL.
3. Terdapat Transfer Masuk Tanah dan Bangunan papan nama BSIP sebesar Rp.54.739.150,00 dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan BAST Nomor B-1100/PL.130/H.1/05/2023.
4. Terdapat Kontruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan berupa pagar dan gapura sebesar Rp.376.894.669,00 berasal dari pengawasan sebesar Rp.73.363.000 dan Rp.303.531.669 pekerjaan fisik pagar dan gapura hal ini dikarenakan sampai akhir tahun pekerjaan fisik belum selesai dikerjakan sehingga diperpanjang waktunya selama 45 hari.
5. Terdapat aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp944.512.000,00 yang diperoleh dari Belanja Modal tahun anggaran 2023.
6. Terkait dengan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pegawai PSI Tanaman Pangan sebanyak 4 orang sebesar Rp.44.580.000,00 sampai dengan 31 Desember 2023 telah disetor Rp.2.900.000,00 sehingga jumlah setelah dikurang setoran sebesar Rp.41.680.000,00. Jumlah tersebut akan diinput Neraca Akun Piutang Lainnya setelah ada rekomendasi dari BPK dan Instruksi dari Eselon I tetapi untuk validasi piutang kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tersebut telah dibuat SPTJM Nomor 366/KU.060/H.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	SK MENTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	SELISIH PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2023		TELAH DIPOTONG OLEH KEUANGAN SEJAK SEPTEMBER SD NOVEMBER 2023 (UNTUK DI SETOR)	SETOR KE KAS NEGARA (NTPN)	SELISIH BELUM DIPOTONG/ DISETOR
			Sept 2022- Juni 2023, Gaji 13, 14	Sept 2022- Des 2023, Gaji 13, 14			
PSI TANAMAN PANGAN							
1	Syarifah Aminah, SP, M.Si	1278/Kpts/kp.240/A2/08/2022		9.900.000	-		9.900.000
2	Dr. Nuning Argo Subekti, S.P,M.Sc	1277/Kpts/kp.240/A2/08/2022	9.960.000		2.060.000	EF7022G4VGV RDU9A	7.900.000
3	Eman Paturohman, SP, M.Si	1279/Kpts/kp.240/A2/08/2022		18.000.000	-		18.000.000
4	Nia Romania Patriyawati, S.P, M.Phil.	1281/Kpts/kp.240/A2/08/2022	6.720.000		840.000	EF7022G4VGV RDU9A	5.880.000
	Jumlah		16.680.000	27.900.000	2.900.000		41.680.000

7. Sesuai dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, tidak ada lagi fungsi Litkajibangrap di Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian Badan Litbang Pertanian sudah tidak ada lagi. Selanjutnya ada Badan baru yaitu Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Semua sumberdaya (SDM, sarana dan prasarana) yang ada di Badan Litbang Pertanian dialihkan ke BSIP. Salah satu Unit Kerja di BSIP adalah Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan. Semua sumberdaya (SDM, sarana dan prasarana) yang ada Puslitbang Tanaman Pangan dialihkan ke Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.